

Dewan Ketahanan Nasional
Sekretariat Jenderal

2023

LAPORAN KINERJA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh....

Salam sejahtera bagi kita semua....

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Setjen Wantannas tahun 2023. Diharapkan laporan kinerja Setjen Wantannas ini bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan 2023 serta memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Setjen Wantannas selama tahun 2023.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan di tahun mendatang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja Setjen Wantannas tahun 2023.

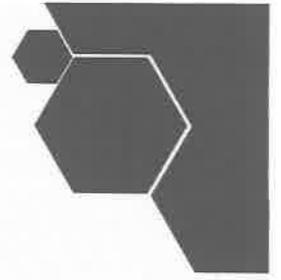
Jakarta, Februari 2024

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional



Dadi Hartanto, M.Tr. (Han).

Laksamana Madya TNI



PERNYATAAN DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024
Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi,
dan Pengawasan Internal

Elphis Rudy, M.M., M.S.S.
Brigadir Jenderal TNI

Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Setjen Wantannas tahun 2023 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dicapai oleh Setjen Wantannas tahun 2023 yang didasarkan atas Rencana Strategis Wantannas Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja Setjen Wantannas terdiri dari:

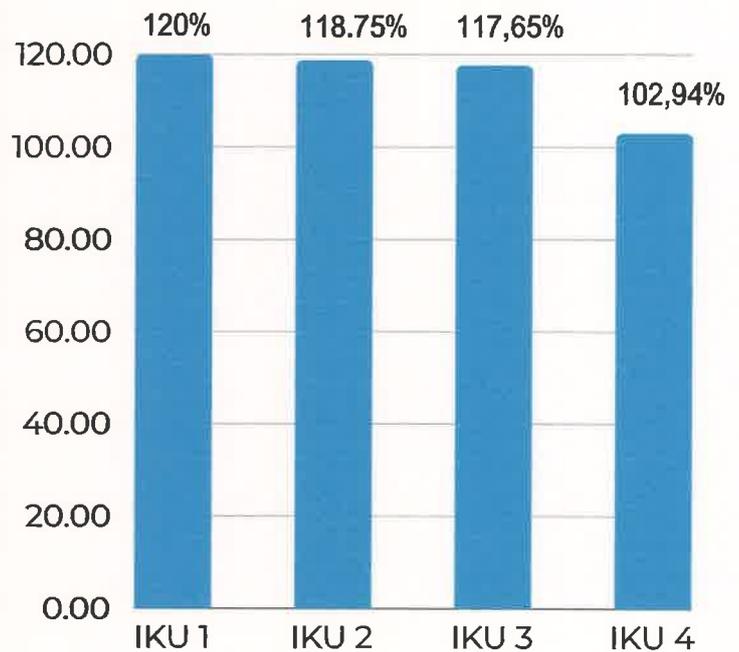
3 Tujuan

2 Sasaran Strategis

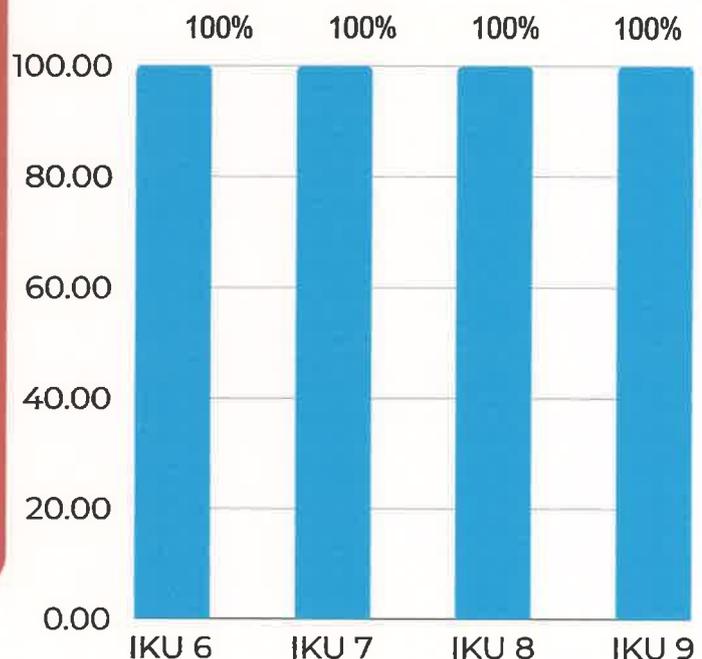
9 Indikator SS

Capaian kinerja atas indikator kinerja utama tahun keempat (Tahun 2023) periode Renstra 2020-2024 memberikan gambaran keberhasilan kinerja dalam pencapaian misi di Setjen Wantannas. Ukuran tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

CAPAIAN SS1



CAPAIAN SS2



DAFTAR ISI

• KATA PENGANTAR	2
• IKHTISAR EKSEKUTIF	4
• DAFTAR ISI	5
• BAB I PENDAHULUAN	6
• BAB II PERENCANAN KINERJA	12
• BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
• BAB IV PENUTUP	43



BAB I

PENDAHULUAN



Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dibentuk pada tahun 1999, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.



TUGAS



Dewan Ketahanan Nasional

Membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.



Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional, untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

FUNGSI



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen Wantannas telah berkontribusi dalam berbagai jenis rekomendasi kebijakan ke Presiden. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Setjen Wantannas berupa:

- **Kajian Dinamis**

Suatu telaahan strategis yang diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.

- **Kajian Siklis**

Suatu telaahan strategis yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang. Dalam hal ini kajian siklis dalam bentuk:



1. Kirstranas (Perkiraan Strategis Nasional): Perkiraan kondisi kehidupan nasional pada satu tahun berikutnya dan pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan;
 2. Apstranas (Apresiasi Strategis Nasional): Telaahan tentang prioritas sasaran, arah kebijakn dan perkiraan risiko pembangunan pada satu tahun berikut, termasuk antisipasi mengurangi derajat risiko disusun berdasarkan isu strategis global, regional dan nasional;
 3. Telstranas (Telaahan Strategis Nasional): Telaahan tentang perkiraan kondisi kehidupan nasional pada lima tahun ke depan, serta pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu strategis yang perlu diperhatikan;
 4. Stranas (Strategis Nasional): Telaahan tentang kecenderungan lingkungan strategis, peluang dan kendala, prioritas sasaran, arah kebijakan dan perkiraan risiko pembangunan pada lima tahun yang akan datang; dan
 5. Renkonnas (Rencana Kontijensi Nasional): Telaahan tentang rencana kontijensi menghadapi risiko pembangunan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara.
- **Kajian Kerjasama Dalam Negeri**
Kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparaturnya, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah.
 - **Saran Tindak (FGD dan RTD)**
Diskusi yang dipandu oleh moderator dalam rangka mengeksplorasi topik terkait stabilitas keamanan nasional dan menghasilkan rekomendasi.
 - **Forum Group Discussion**
Kelompok diskusi terarah dengan peserta berjumlah 8-12 orang dan dipimpin oleh moderator yang bertujuan untuk menyamakan persepsi atas topik atau isu terkait stabilitas keamanan nasional.

ISU STRATEGIS WANTANNAS

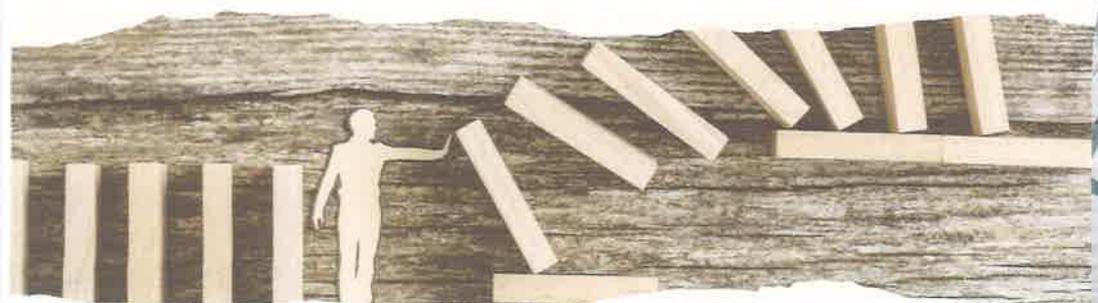
Terdapat 3 (tiga) isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Setjen Wantannas yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa mendatang, yaitu:

- Sudah tidak relevannya Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas;
- Belum terealisasinya pelaksanaan Sidang Dewan; dan
- Belum optimalnya manajemen kinerja.

PERMASALAHAN UMUM

Terdapat permasalahan utama yang dihadapi Setjen Wantannas, yaitu:

- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Wantannas sesuai dengan Keputusan Presiden No.101 Tahun 1999, antara lain:
 1. Belum terwujudnya penetapan kebijakan dan strategi ketahanan nasional oleh Dewan Ketahanan Nasional.
 2. Penetapan kebijakan dan strategi ketahanan nasional oleh Dewan Ketahanan Nasional masih dalam tahap pra sidang dewan
 3. Capaian Setjen Wantannas saat ini, berupa Rekomendasi Kebijakan (RK) yang dijadikan sebagai bahan Pra Sidang Dewan, dan dikirim kepada presiden serta dijadikan rekomendasi kepada K/L terkait
- ✓ Dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Dewan, Keputusan Presiden No.101 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
- ✓ Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran Wantannas masih dibawah kebutuhan ideal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Wantannas secara lebih optimal.
- ✓ Terbatasnya perwakilan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan di lingkungan Setjen Wantannas yang bertugas menyusun dan mengkaji permasalahan ketahanan nasional yang meliputi aspek Asta Gatra.



SUMBER DAYA MANUSIA

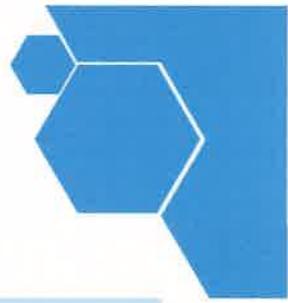
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023 Setjen Wantannas memiliki pegawai sebanyak 159 orang, dengan rincian sebagai berikut:



BAB II

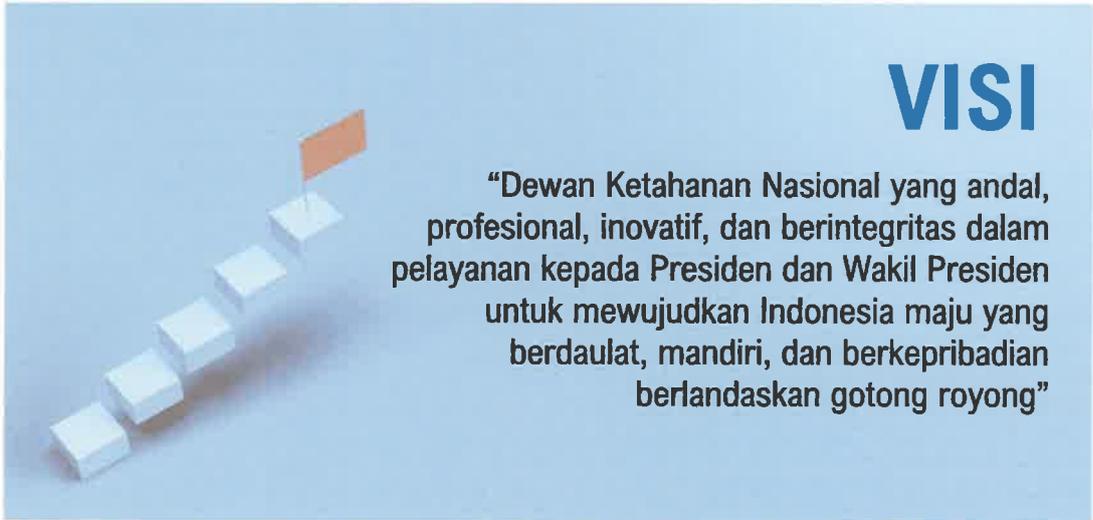
PERENCANAAN KINERJA





VISI

“Dewan Ketahanan Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”



MISI

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana lembaga Dewan Ketahanan Nasional.



TUJUAN WANTANNAS



- Terwujudnya ketetapan kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- Terselenggaranya kapasitas pelayanan kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien; dan
- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.

PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2023, Setjen Wantannas merencanakan Prioritas Nasional dengan rincian sebagai berikut:

PN

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PP1

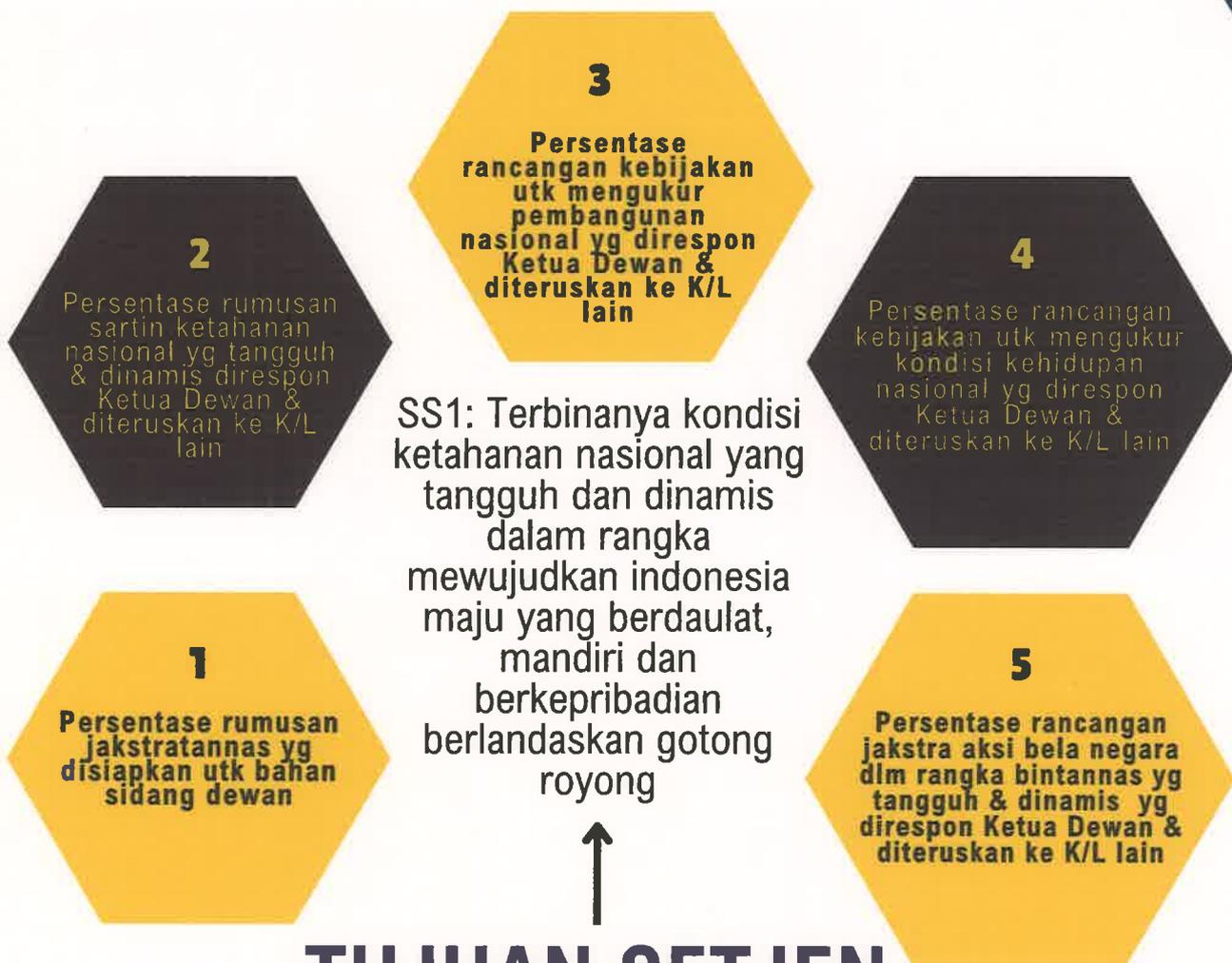
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

KP

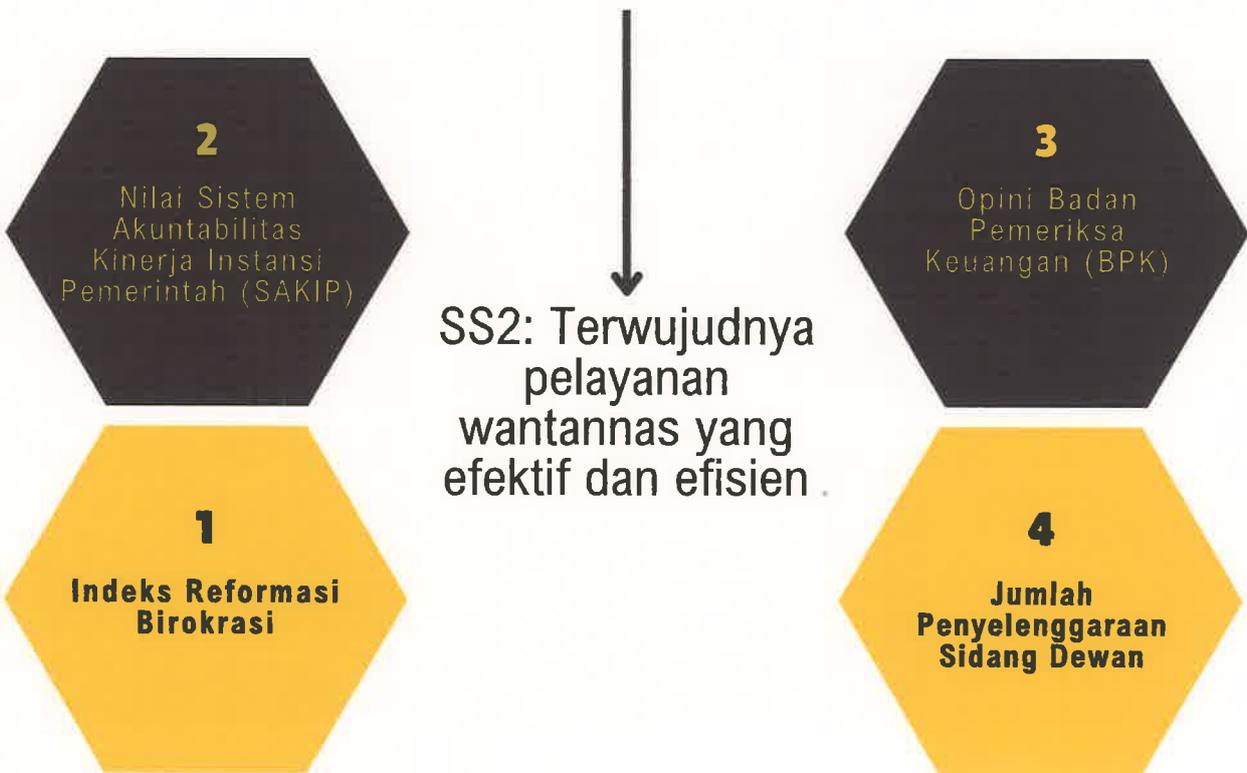
Penguatan Keamanan Dalam Negeri

**Pro
PN**

Penanganan Konflik Secara Humanis



TUJUAN SETJEN WANTANNAS



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

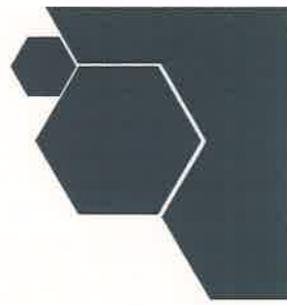




CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Setjen Wantannas TA 2023 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan adalah hasil dari proses pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui keberhasilan visi-misi Wantannas. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja dengan kategori capaian kinerja sebagai berikut :

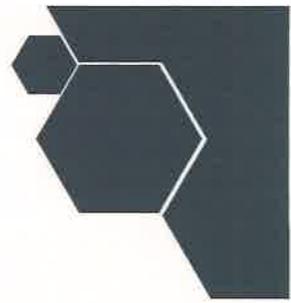




SASARAN STRATEGIS #1

Terbinanya Kondisi Ketahanan Nasional yang Tangguh dan Dinamis dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong





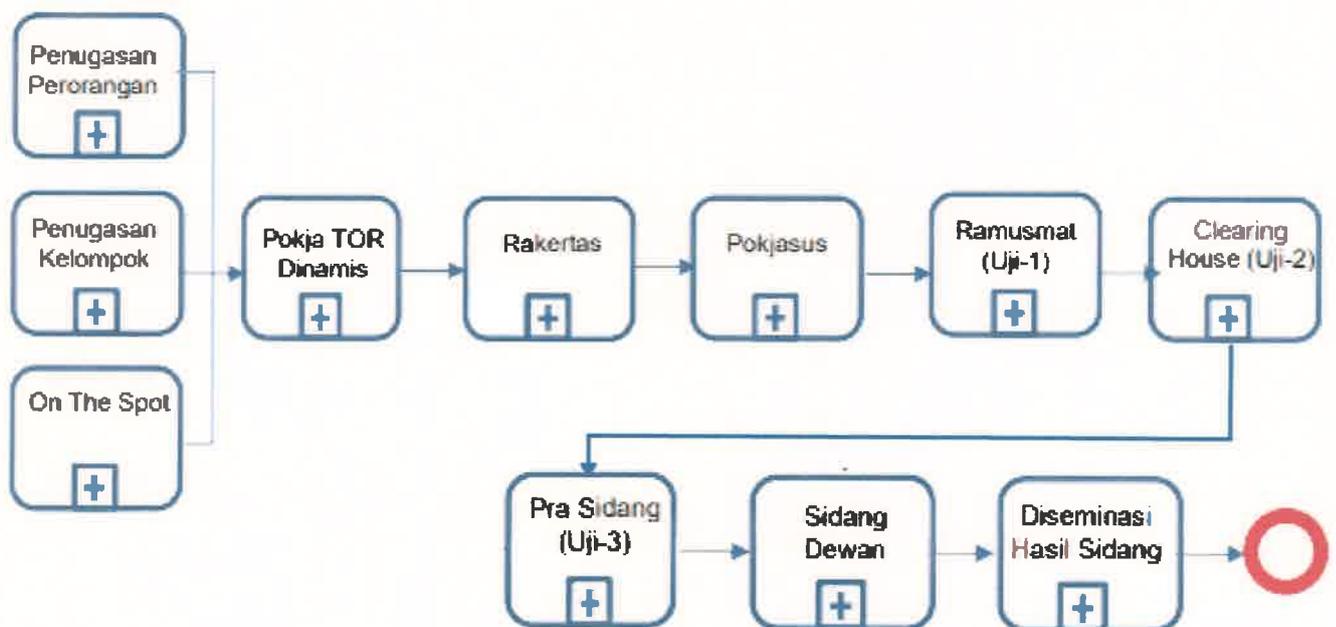
INDIKATOR KINERJA: 1

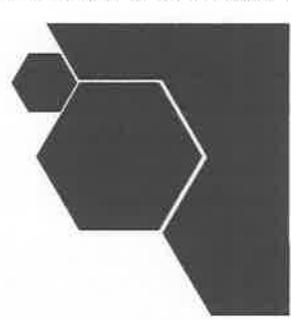
Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan

Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan ketahanan nasional. Di mana pembahasan dan penetapannya dilaksanakan melalui tahapan Uji Clearing House dan pelaksanaan sidang dan pascasidang. Uji Clearing House terdiri dari 3 (tiga) tahap:

- Rapat Uji Materi Forum I : dipimpin oleh Deputi, dihadiri oleh Deputi lainnya, Kapokja, dan Sekretaris Pokja. Berfokus kepada redaksional. Menghasilkan Naskah ke-1 (N-1);
- Rapat Uji Materi Forum II : menyajikan N-1 kepada Sesjen Wantannas untuk mendapat tanggapan. Menghasilkan Naskah ke-2 (N-2); dan
- Rapat Uji Materi Forum III : menghadirkan pejabat eselon I perwakilan Kementerian/LPNK untuk mendapat tanggapan terkait dengan substansi telaahan. Menghasilkan Naskah ke-3 (N-3).

Di bawah ini merupakan proses bisnis penyiapan Naskah Sidang Dewan:





Adapun formula perhitungan kinerja untuk indikator ini adalah rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional N-3 yang akan dihasilkan Sesjen setelah Uji Materi Forum Prasadang dibagi N-2 yang dijadikan bahan Uji Materi Prasadang dikalikan seratus persen.

$$PRD = \frac{\sum N-3}{\sum RN-3} \times 100 \%$$

Keterangan:

- PRD : Persentase Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional N-3 yang dijadikan rumusan kebijakan dan disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional (atas petunjuk Ketua Dewan).
- N-3 : Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional N-3 yang akan dihasilkan Sesjen setelah Uji Materi Forum Prasadang.
- RN-3 : Naskah N-2 yang disetujui sebagai bahan Uji Materi Prasadang.

Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional (Naskah N-3) yang dijadikan rumusan kebijakan dan disiapkan untuk bahan Sidang Dewan, sebagai berikut:

$$PRD = \frac{\sum N - 3}{\sum RN - 3} \times 100\%$$

$$PRD = \frac{12}{12} \times 100\%$$

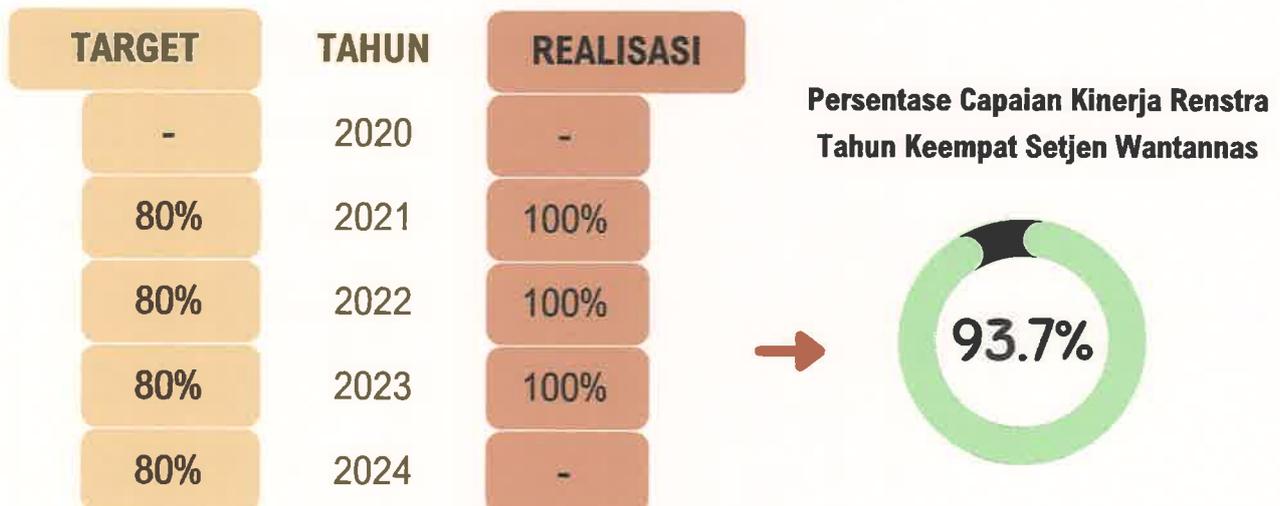
$$PRD = 100\%$$

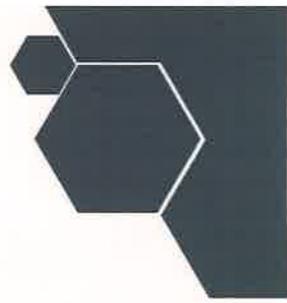
Ketercapaian atas indikator "*persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan*" disebabkan adanya evaluasi dan komitmen Setjen Wantannas dalam menyiapkan bahan prasadang dewan. Seluruh rekomendasi kebijakan telah dimanfaatkan sebagai rekomendasi kepada Presiden untuk dijadikan bahan Sidang Dewan.



Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2023 berdasarkan indikator ini adalah sebesar 100% (empat kali sidang dewan) dari target sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja 125% (maksimal 120%) atau kategori **Sangat Berhasil**. Indikator ini dicapai dari 2 komponen yaitu Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional N-3 yang akan dihasilkan Sesjen setelah Uji Materi Forum Prasadang dan Naskah N-2 yang dijadikan bahan Uji Materi Prasadang.

Berikut disajikan realisasi kinerja sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra Setjen Wantannas 2020-2024. Adapun target dan realisasi TA 2020 masih menggunakan indikator Indeks Ketahanan Nasional berdasarkan Renstra 2015-2019.





INDIKATOR KINERJA: 2

Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang direspon Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain

Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:

- Kajian Kerjasama
- Perkiraan Cepat
- Round Table Discussion
- Forum General Discussion
- Telaahan Staf

Formula Perhitungan Kinerja:

$$\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$$



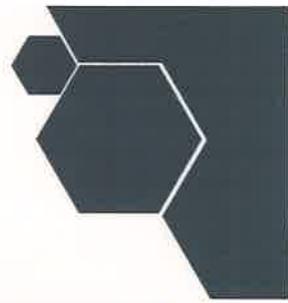
Keterangan:

PSTP : Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang direspon Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain

RSTS : Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional direspon Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain

STS : Jumlah saran tindak di Kedepuitan yang dikirim ke Ketua Dewan

Pada tahun 2023, saran tindak yang dihasilkan Setjen Wantannas berjumlah 43 rumusan saran tindak yang dilaksanakan oleh 4 Unit Kerja Deputi dengan persentase direspon Ketua Dewan sebesar 95%. Dengan rincian sebagai berikut:



Naskah Saran Tindak	Target	Realisasi	RK Dikirim	RK Direspon
Kajian Kerjasama	14	14	11	11
RTD/FGD	29	29	29	27
Total	43	43	40	38

Persentase saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti, sebagai berikut:

$$PSTP = \frac{\sum RSTS}{\sum STS} \times 100\%$$

$$PSTP = \frac{38}{40} \times 100\%$$

$$PSTP = 95\%$$

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2023 berdasarkan indikator ini adalah sebesar 95% dari target sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja 119% atau kategori **Sangat Berhasil**. Sebanyak 40 RK yang telah dikirim ke Presiden, terdapat 38 RK mendapat respon berupa disposisi ke Kementerian/Lembaga terkait. Adapun 3 RK yang tidak dikirim, dijadikan sebagai bahan pertimbangan internal Setjen Wantannas.

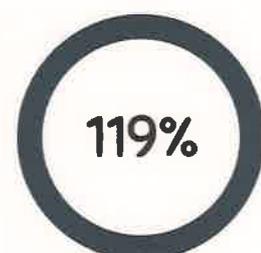
TARGET



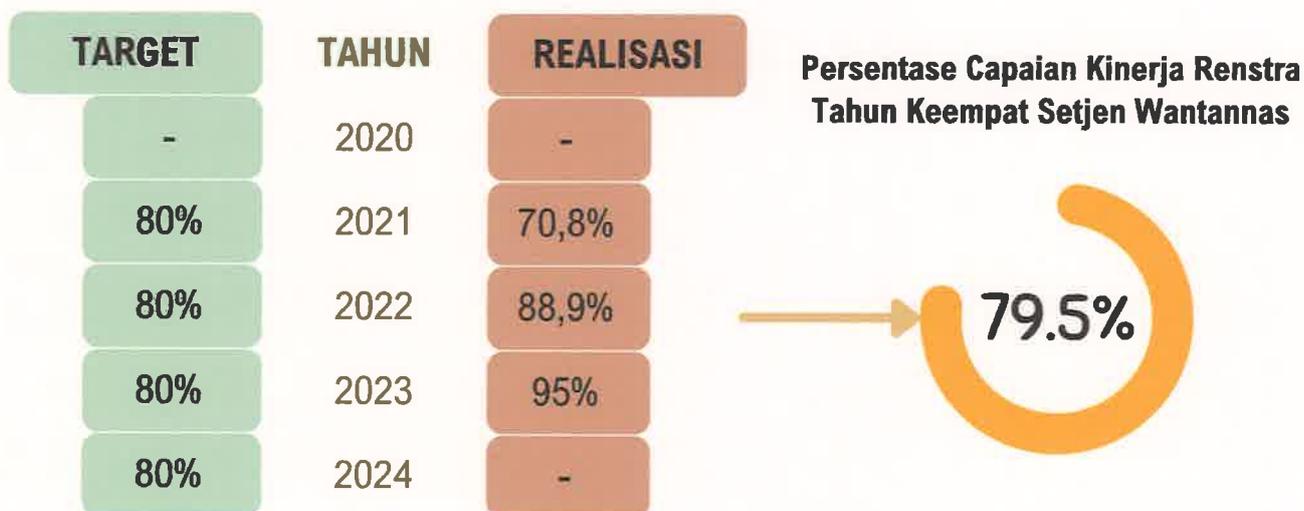
REALISASI



PERSENTASE CAPAIAN



Berikut disajikan realisasi kinerja sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra Setjen Wantannas 2020-2024.



INDIKATOR KINERJA: 3

Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang direspon Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain

Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui saran tindak pemantauan dan pengukuran pembangunan nasional dilaksanakan melalui saran tindak. Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:

- Perkiraan cepat;
- Round Table Discussion; dan
- Forum General Discussion.

Formula perhitungan kinerja, sebagai berikut:

$$\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$$

Keterangan:

PSTP : Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang direspon Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain

RSTS : Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional direspon Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain

STS : Jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dikirim ke Ketua Dewan

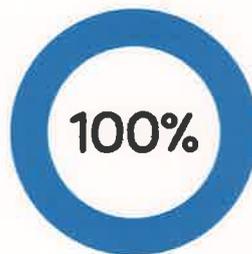
Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2022 berdasarkan indikator "persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan" sebesar 100% dari target sebesar 85% dengan persentase capaian kinerja 117,65% atau kategori **Sangat Berhasil**. Dari 8 rumusan saran tindak yang ditargetkan untuk direspon oleh Presiden RI, telah terealisasi dengan secara optimal ditandai dengan diresponnya semua rumusan saran tindak oleh Presiden RI dan telah didisposisi ke Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dikarenakan rumusan saran tindak yang dihasilkan berasal dari pemantauan pembangunan nasional yang aktual. Dengan rincian sebagai berikut:

Naskah Saran Tindak	Target	Realisasi	RK Dikirim	RK Direspon
RTD/FGD	8	8	8	8

TARGET



REALISASI



PERSENTASE CAPAIAN



Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator ketiga tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Renstra Setjen Wantannas:



INDIKATOR KINERJA: 4

Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang direpson Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain



Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui saran tindak pemantauan dan pengukuran kondisi kehidupan nasional. Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:

- Perkiraan cepat;
- *Round Table Discussion*; dan
- *Forum General Discussion*.

$$PSTK = \sum RSTK$$

Formula perhitungan kinerja, sebagai berikut:

$$\frac{\sum RSTK}{\sum STK} \times 100 \%$$



Keterangan:

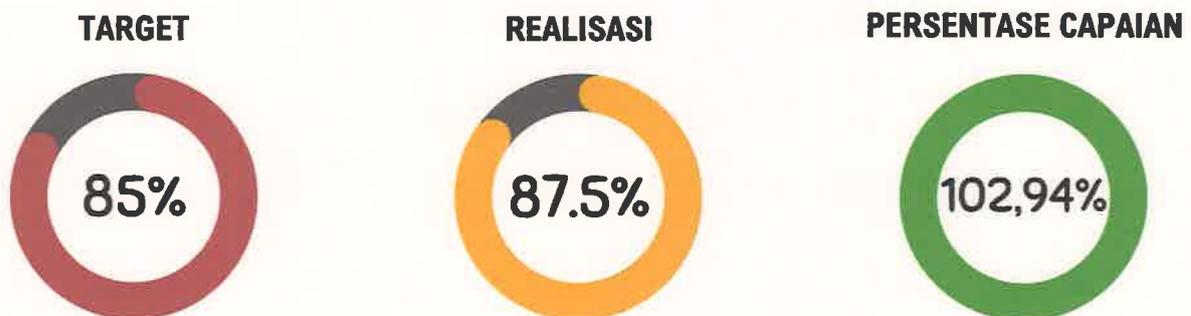
PSTK : Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang direspon Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain

RSTK : Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional di Kedepatian yang direspon Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain

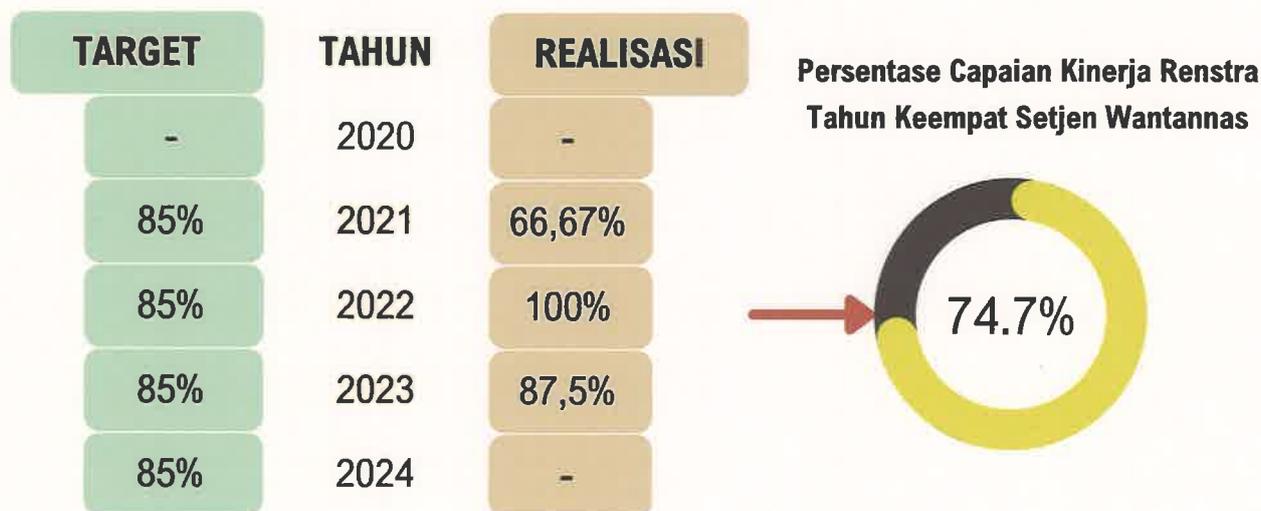
STK : Jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Ketua Dewan

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2023 berdasarkan indikator "persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan" adalah sebesar 87,5% dari target sebesar 85% dengan persentase capaian kinerja 102,94% atau **Sangat Berhasil**. Dari 8 rumusan saran tindak yang ditargetkan untuk direspon Presiden RI, telah direspon sebanyak 7 rumusan saran tindak ditandai dengan adanya disposisi ke Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dikarenakan rumusan saran tindak yang dihasilkan berasal dari pemantauan kondisi kehidupan nasional yang aktual. Dengan rincian sebagai berikut:

Naskah Saran Tindak	Target	Realisasi	RK Dikirim	RK Direspon
RTD/FGD	8	8	8	7



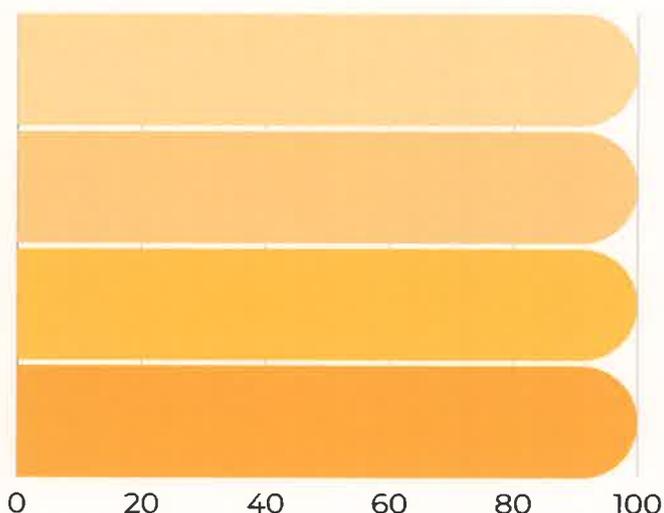
Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator keempat tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Renstra Setjen Wantannas:



INDIKATOR KINERJA: 5

Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang di respon Ketua Dewan dan diteruskan ke K/L lain

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Setjen Wantannas melaksanakan kegiatan bela negara dengan *output* dan *outcome* yang mendukung penguatan ketahanan nasional. Pelaksanaan kegiatan Bela Negara tahun 2018 sampai dengan 2019 berdasarkan inpres nomor 7 tahun 2018. Di tahun 2020 sampai dengan 2022, kegiatan Bela negara Setjen Wantannas masuk dalam Prioritas Nasional. Adapun rincian kegiatan bela negara Setjen Wantannas tahun 2019 s.d 2022 sebagai berikut:



2019 : Telah terealisasi 2 Aksi Bela Negara berupa Sosialisasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Internalisasi, dan Aksi Gerakan Bela Negara

2020 : Telah terealisasi 1 Aksi Bela Negara berupa Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Bela Negara

2021 : Telah terealisasi 1 Rekomendasi Kebijakan berupa tersusunnya Modul Bela Negara

2022 : Telah terealisasi 2 Rekomendasi Kebijakan berupa Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bela Negara, serta Sosialisasi Pelaksanaan Aksi Bela Negara dan Rekomendasi Kebijakan



Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator kelima tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Renstra Setjen Wantannas:

TARGET	TAHUN	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Renstra Tahun Keempat Setjen Wantannas
85%	2020	100%	
85%	2021	100%	
85%	2022	100%	
85%	2023	-	
85%	2024	-	

Pada tahun 2023 Setjen Wantannas tidak lagi memperoleh anggaran untuk kegiatan bela negara, karena tidak lagi merupakan Prioritas Nasional.

PRIORITAS NASIONAL

*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik*





Pada Tahun 2023 ini Wantannas memiliki 2 tema perihal Prioritas Nasional, sebagai berikut :

Tema 1 : Penyusunan Rumusan Kebijakan dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024

Tema 2 : Penyusunan Rumusan Kebijakan dalam Rangka Kerawanan Keamanan Nasional Terkait Daerah Tertentu

- Dari Tema 1 PN telah menghasilkan output berupa Rekomendasi Kebijakan dengan judul "Perumusan Kebijakan Penanganan Kerawanan Pelaksanaan Pemilu 2024" dan telah dikirim kepada Presiden serta mendapat respon Presiden.
- Sedangkan Tema 2 PN telah menghasilkan output berupa Rekomendasi Kebijakan dengan judul "Saran Kebijakan Penguatan Peran Masyarakat Sipil Guna Penyelesaian Konflik Papua Secara Dalam Dalam Rangka Ketahanan Nasional" dan "Rekomendasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional di Kepulauan Natuna Untuk Meningkatkan Keamanan Nasional Dalam Rangka Memperkuat kedaulatan Negara" dan telah dikirim kepada Presiden serta mendapat respon Presiden



SASARAN STRATEGIS

#2

Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien





INDIKATOR KINERJA: 6

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan nasional menuju daya saing global. Terdapat penajaman road map RB 2020-2024 melalui Permenpan RB No. 3 tahun 2023.



Fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB menjadi RB General (arah kebijakan RB mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional) dan RB tematik (arah kebijakan RB memperbaiki manajemen internal instansi pemerintah)

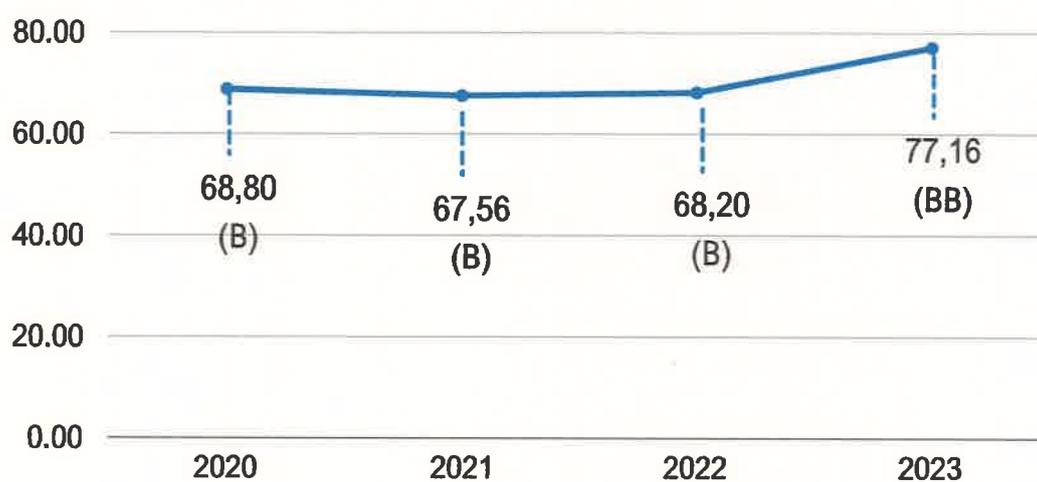
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN.

Setjen Wantannas ikut berperan dalam pemenuhan RB general dan RB tematik. melalui peran serta Setjen Wantannas diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan sebagaimana yang diharapkan dalam grand desain reformasi birokrasi 2010-2025.

Realisasi kinerja Setjen Wantannas atas indikator indeks RB adalah BB dari target BB dengan persentase capaian kinerja 100% atau kategori **Berhasil**. Indeks RB ini menunjukkan bahwa Setjen Wantannas telah mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.



Indeks RB Setjen Wantannas mengalami kenaikan secara signifikan atas penilaian RB tahun 2023 sebesar 77,16 (BB) dari yang semula 68,20 (B) pada tahun 2022. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 sampai dengan 2023:



Berikut ditampilkan pula perbandingan dengan Renstra Setjen Wantannas 2020-2024:

TARGET	TAHUN	REALISASI
B	2020	B
B	2021	B
BB	2022	B
BB	2023	BB
BB	2024	-

INDIKATOR KINERJA: 7

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

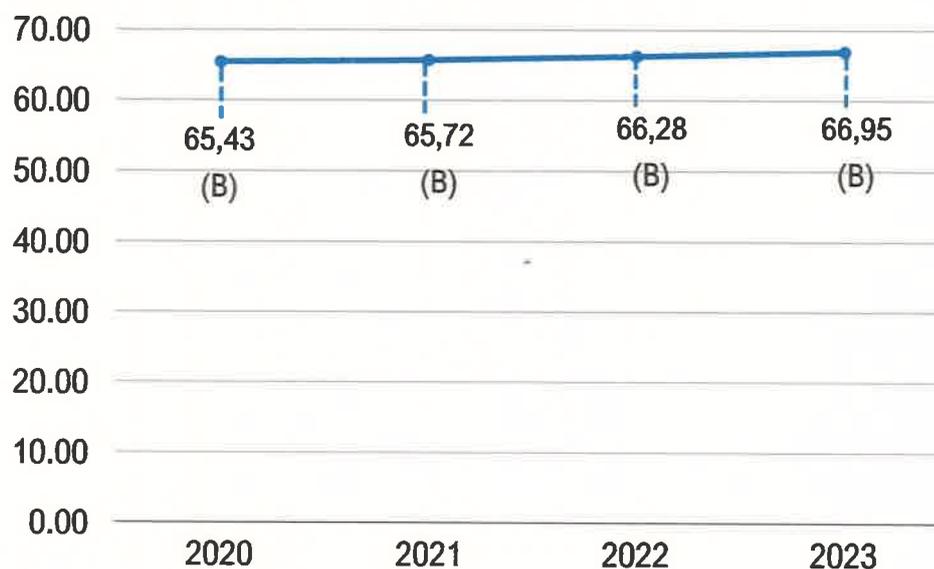
SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

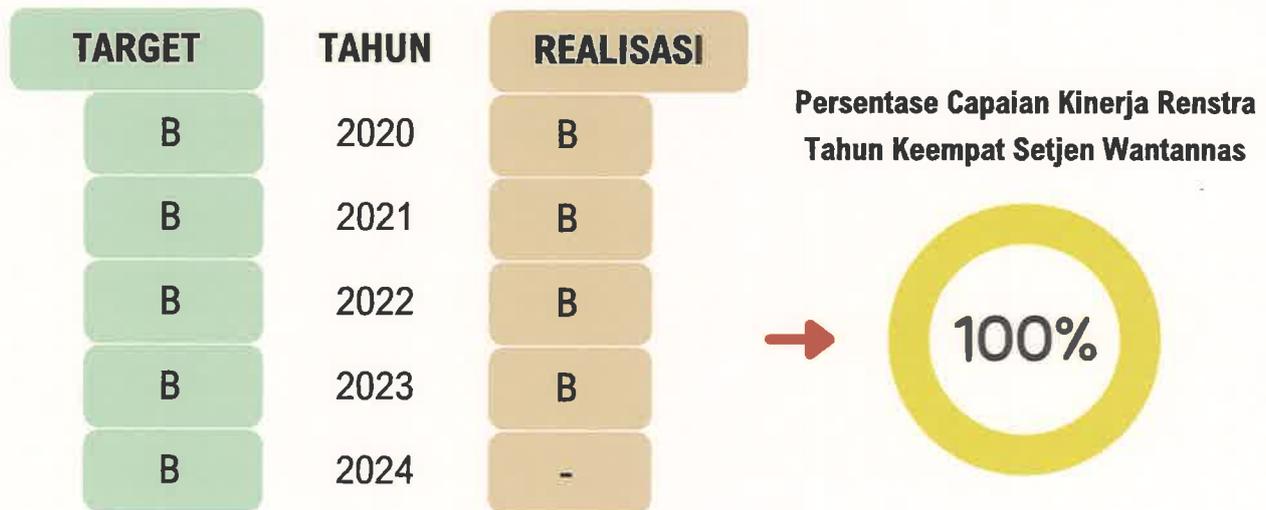
- Rencana Strategis;
- Perjanjian Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pengelolaan Data Kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2023 berdasarkan indikator nilai SAKIP adalah 66,95 (masuk kriteria B) dari target B dengan persentase capaian kinerja 100.00% atau kategori **Berhasil**.



Berikut ditampilkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023 serta perbandingan dengan Renstra Setjen Wantannas 2020-2024:





INDIKATOR KINERJA: 8

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Salah satu indikator keberhasilan suatu kementerian/lembaga dalam peningkatan kualitas sumber daya organisasi adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Pemeriksaan laporan keuangan Setjen Wantannas tahun 2023 masih berlangsung sehingga belum diketahui hasilnya sampai dengan disahkannya laporan ini. Prestasi Setjen Wantannas sebagai lembaga yang meraih opini WTP selama 16 (enambelas) tahun berturut-turut yaitu laporan keuangan 2007 sampai dengan 2022.

Pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Setjen Wantannas dikarenakan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.





INDIKATOR KINERJA: 9

Jumlah Penyelenggaraan Sidang Dewan

Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan ketahanan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Tahapan penyelenggaraan sidang dewan:

- Persiapan sidang (Inisiasi dan Uji Materi dalam Forum Deputi/Uji Pertama);
- Forum Sesjen/Uji Kedua;
- Forum Prasadang Dewan/Uji Ketiga; dan
- Pelaksanaan Sidang dan Pascasidang.

Formula Perhitungan Kinerja: $JSD = \frac{\sum JSDL}{\sum JSDT} \times 100\%$

Keterangan:

JSD : Jumlah Sidang Dewan

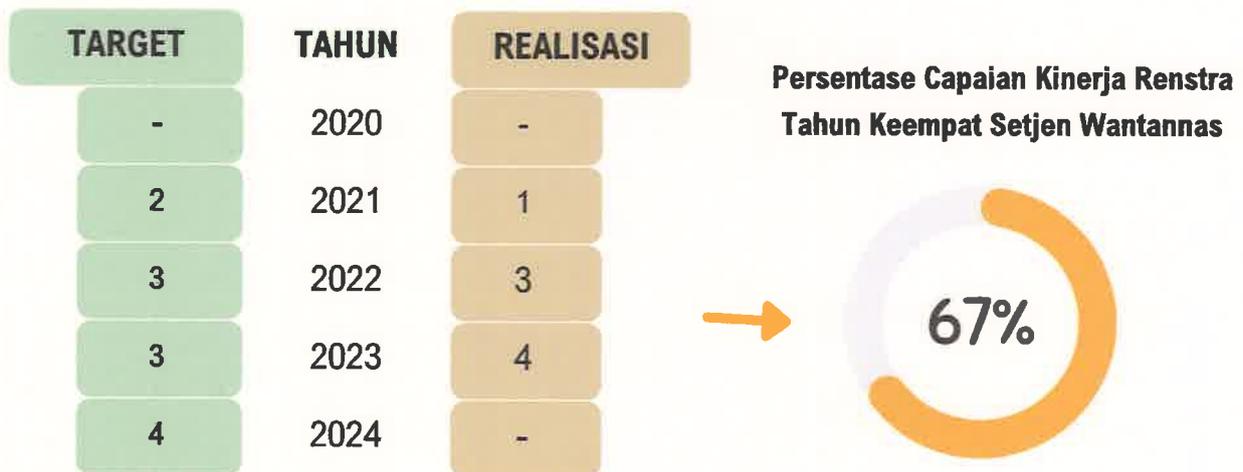
RSDP : Jumlah Sidang Dewan yang dilaksanakan atau Hasil Prasadang Dewan yang Dikirim ke Presiden

RSDS : Jumlah Sidang Dewan yang ditargetkan

Pada tahun 2023, telah terlaksana sebanyak 4 kali prasadang Dewan. Kondisi ini melebihi target yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja 2023.



Berikut ditampilkan pula perbandingan dengan Renstra Setjen Wantannas 2020-2024:





ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Setjen Wantannas.

IKU	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	%	EFISIENSI
1	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan sidang dewan	Persen	80	100	120%	4,802,515,000	4,771,954,020	99.36%	120.00%
2	Persentasi rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang direspon ketua dewan dan diteruskan ke K/L lain	Persen	80	95	118.75%	2,931,671,000	2,902,068,125	98.99%	119.96%
3	Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang direspon ketua dewan dan diteruskan ke K/L lain	Persen	85	100	117.65%	161,400,000	159,192,600	98.63%	119.28%
4	Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur keondisi kehidupan nasional yang direspon ketua dewan dan diteruskan ke K/L lain	Persen	85	88	102.94%	161,400,000	161,121,500	99.83%	103.12%
5	Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang direspon ketua dewan dan diteruskan ke K/L lain	Persen	85	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Indeks RB	Indeks	BB	BB	100%	60,175,000	60,172,000	100%	100%
7	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	100%	101,071,000	100,775,600	99.71%	100.29%
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	175,020,000	174,055,075	99.45%	100.55%
9	Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan/Pra Sidang Dewan	Kali	3	4	120%	316,434,000	295,923,600	93.52%	120.00%

KET : IKU 5 (Penjelasan di Hal 29)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada.

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator-indikator tersebut. Seperti contoh pada IKU 1, realisasi kinerja adalah 100% dari target 80% sehingga persentase capaian target IKU 1 adalah 120%.

Adapun realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut, sebanyak Rp4.802.515.000 telah terealisasi dari pagu Rp4.771.954.020 atau dengan kata lain dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,36% untuk mencapai target kinerja tersebut. Artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai target IKU 1 adalah 120,00% atau efisiensi.



Berdasarkan cara penghitungan dan perbandingan sebagaimana dipaparkan di paragraf sebelumnya, diperoleh nilai efisiensi Setjen Wantannas adalah sebesar 110,40% atau dapat pula diartikan **efisien** (lebih dari 100%).

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/MENGAKIBATKAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Tercapainya target kinerja pada 2023 dengan kategori sangat baik (> 100%) menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan pada 2023 disertai penggunaan anggaran secara efisien dengan realisasi sebesar 110,40%. Hal ini ditunjang dengan adanya komitmen serta tanggung jawab pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai target kerjanya masing-masing.



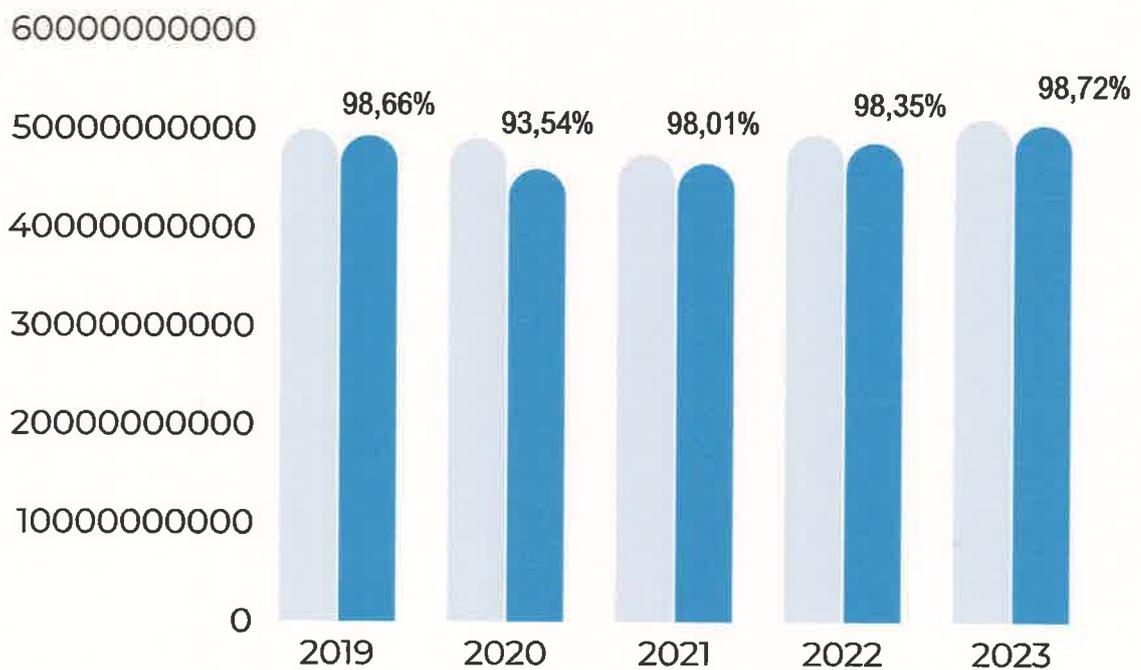
2023

Realisasi Anggaran

PAGU ANGGARAN
Rp 51,020,046,000

REALISASI ANGGARAN
Rp 50,369,298,518

PERSENTASE CAPAIAN
98,72%



Keterangan



Pagu Anggaran



Realisasi Anggaran

TARGET	TAHUN	REALISASI
49.950.018.000	2019	49.278.937.866
49.051.252.000	2020	45.884.008.145
47.429.582.000	2021	46.485.176.307
49.396.415.000	2022	48.582.837.867
51.020.046.000	2023	50.369.298.518

A photograph of two hands clasped together in a firm grip. The hands are positioned in the center of the frame. The background is split horizontally: the top half is a solid red color, and the bottom half is a solid light blue color. The hands appear to be emerging from the bottom of the frame. The hand on the left is wearing a white sleeve, and the hand on the right is wearing a grey and white striped sleeve. The lighting is soft, highlighting the texture of the skin and the fabric of the sleeves.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setjen Wantannas Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas kinerja Setjen Wantannas. LAKIP Setjen Wantannas menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pada tahun anggaran 2023 serta sebagai acuan strategi dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan rencana kinerja di masa yang akan datang.

Kinerja Setjen Wantannas tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai capaian kinerja dengan kategori Berhasil, dengan capaian 2 (dua) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama Sasaran, sebagai berikut: 5 indikator kinerja utama sasaran dengan kategori capaian kinerja Sangat Berhasil, 3 indikator kinerja utama sasaran dengan kategori capaian Berhasil.

Akhirnya, Setjen Wantannas mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen atas dukungan yang diberikan dalam pencapaian kinerja tahun 2023. Setjen Wantannas terus berupaya melakukan perbaikan dalam menjawab tantangan di masa mendatang secara konsisten dan berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2024

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional



Dadi Hartanto, M.Tr. (Han).
Laksamana Madya TNI